

Wakil Bupati Kolaka Tinjau Pembangunan Bantuan Rumah Kampung Bajo

Kolaka, SultraNET. | Wakil bupati Kolaka H. Muh. Jayadin, SE.,ME melakukan peninjauan bantuan pembangunan rumah masyarakat kampung bajo di kelurahan anaiwoi, kecamatan tanggetada bersama asisten II Ir. H. Abbas, MM, Ketua tim dari kementerian ibu Ira, serta seluruh pimpinan OPD yang terkait . Selasa, (26/09/2023)



Wakil bupati Kolaka H. Muh. Jayadin, SE.,ME saat meninjau Pembangunan Rumah Bantuan di Kampung Bajo

Wakil Bupati Kolaka menyampaikan, Kegiatan ini dalam rangka untuk membuktikan sejauh mana komitmen pemerintah Kabupaten Kolaka dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan strategis dari Kementerian PU dan pusat.

“Perjuangan untuk mendapatkan program ini bukanlah hal yang mudah, dimulai

dari administrasi juga dibutuhkan suatu komitmen nyata dari pemerintah Kabupaten Kolaka, dan semua itu telah kami buktikan dari seluruh Kabupaten dan kota yang mengikuti kegiatan ini, pada akhirnya Kabupaten Kolaka menjadi salah satu dari 13 Kabupaten berhasil mendapatkan program itu ." Singkatnya.

Pemkab Bombana dan BPK-RI Sosialisasi Pengawasan Dana Desa

Bombana, SultraNET. | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) gelar Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa yang dihadiri langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sultra Dadek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE., CA., CSFA dan Anggota Komisi XI DPR RI Bahtera, S.PWK. bertempat di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana. Jumat (15/09/2023)

Kegiatan ini digelar menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI No. 20 Tahun 2018 tentang tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa keuangan desa itu dikelola berdasarkan atas asas transparan, akuntabel, partisipatif serta harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk itu, DPR RI bersama BPK RI senantiasa mengawal pengelolaan keuangan desa khususnya di Kabupaten Bombana.

Dengan jumlah desa yang cukup banyak di Kabupaten Bombana, menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Anggaran dana desa di Bombana senilai Rp. 94.867.091.000 telah tersalurkan sejumlah Rp.53.960.943.967 pada tahap I, di tahap II dengan persentase penyerapan sebesar 56,88 persen.

Dalam sambutannya, Sekda Bombana mengatakan dari serapan anggaran tersebut, masih juga terdapat laporan masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bombana mengajak seluruh Kepala Desa di Bombana untuk turut serta berpartisipasi dan meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang ada dalam pengelolaan dana desa.

“Ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kita bersama, terkait harapan kita dalam mewujudkan proses administrasi pertanggungjawaban dana desa yang cepat, akurat dan akuntabel di Kabupaten Bombana” jelas Sekda Man Arfa. (Adv)